



PERJANJIAN KINERJA

KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO

TAHUN 2026





**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FEDDY HANTYO NUGROHO, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIYONO, S.H., M.Hum.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bone Bolango, 12 Januari 2026,

Pihak Kedua,

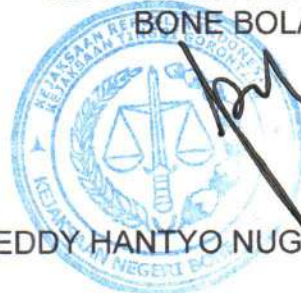
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
GORONTALO,



(RIYONO, S.H., M.Hum.)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BONE BOLANGO,



(FEDDY HANTYO NUGROHO, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO
TAHUN 2026**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	75
2	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Persentase peningkatan pengendalian perkara	63%
		Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	91%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	85%
3	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal	82%
4	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Indeks reformasi birokrasi	85
		Tingkat penerapan etika profesi jaksa	82%

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 305.400.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp 6.420.817.000
Jumlah		Rp 6.726.217.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Layanan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Bone Bolango, 12 Januari 2026,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
GORONTALO,



(RIYONO, S.H., M.Hum.)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BONE BOLANGO,



(FEDDY HANTYO NUGROHO, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YAKUB DANIAL, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FEDDY HANTYO NUGROHO, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bone Bolango, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BONE BOLANGO,

(FEDDY HANTYO NUGROHO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

(YAKUB DANIAL, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI	Nilai SAKIP Kejaksaan Negeri Bone Bolango	73
2	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Kejaksaan RI	Nilai Kinerja Anggaran Kejaksaan Negeri Bone Bolango	90,25
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan RI	Tingkat kepatuhan satuan kerja terhadap standar operasional prosedur	85%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya kualitas layanan internal dukungan manajemen dan kesehatan yustisial	Indeks kepuasan layanan dukungan internal manajemen Kejaksaan Negeri Bone Bolango	3,7
5	Meningkatnya kompetensi Aparatur Kejaksaan RI	Persentase aparatur yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai jabatan	65%
6	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri Bone Bolango	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.420.817.000
	Jumlah	6.420.817.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Bone Bolango, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BONE BOLANGO


(FEDDY HANTYO NUGROHO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,


(YAKUB DANIAL, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FATTAH AMBIYA FAJRIANTO, S.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FEDDY HANTYO NUGROHO, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bone Bolango, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BONE BOLANGO,



(FEDDY HANTYO NUGROHO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
UMUM,

(FATTAH AMBIYA FAJRIANTO, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga pra penuntutan	81%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan	81%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap) dan telah dieksekusi	89%
2	Meningkatnya penegakan hukum yang yang adil, humanis, proporsional, dan efisien	Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai	63%
3	Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan	Tingkat kualitas penanganan perkara yang terekam dalam Case Management System	86%
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum	3,7
5	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelesaian Perkara Pidana Umum dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango	Rp. 8.500.000
2	Penyelesaian Perkara Pidana Umum dalam Tahap Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango	Rp. 87.800.000
3	Penyelesaian Perkara Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango	Rp. 3.800.000
4	Pelaksanaan Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango	Rp. 3.900.000
Jumlah		Rp. 104.000.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Bone Bolango, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BONE BOLANGO,



(FEDDY HANTYO NUGROHO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
UMUM,

(FATTAH AMBIYA FAJRIANTO, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FATHUR ROZY, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FEDDY HANTYO NUGROHO, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bone Bolango, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BONE BOLANGO,


(FEDDY HANTYO NUGROHO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,


(FATHUR ROZY, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penegakan hukum yang adil, humanis, proporsional, dan efisien	Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai	63%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana cukai, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, dan TPPU serta pelanggaran HAM Berat secara transparan, akuntabel dan profesional	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	78%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	85%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU	52%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara pelanggaran HAM Berat	87%
		Tingkat keberhasilan pengendalian operasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus	76%
3	Meningkatnya keberhasilan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana khusus	Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	28%
4	Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan	Tingkat kualitas penanganan perkara yang terekam dalam <i>Case Management System</i>	86%
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum	3,7
6	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan	Rp. 7.700.000
2	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan	Rp. 25.800.000
3	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan	Rp. 11.600.000

4	Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan	Rp. 500.000
Jumlah		Rp. 45.600.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Bone Bolango, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BONE BOLANGO,

(FEDDY HANTYO NUGROHO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,

(FATHUR ROZY, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SANTO MUSA, S.H.,M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FEDDY HANTYO NUGROHO, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bone Bolango, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BONE BOLANGO,


(FEDDY HANTYO NUGROHO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,


(SANTO MUSA, S.H.,M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pemahaman Hukum Masyarakat yang Memuaskan Kepentingan Pemangku	Tingkat Pemahaman Hukum Masyarakat atas Materi Sosialisasi Hukum	84%
		Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Layanan Lukumpenkum	3,7

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan	Tingkat efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan	83%
3	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan Negeri Bone Bolango	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Kampanye Anti Korupsi	Rp. 2.500.000
2	Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan	Rp. 1.300.000
3	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Negeri Bone Bolango	Rp. 3.700.000
4	Layanan Penerangan Hukum	Rp. 2.500.000
5	Layanan Penyuluhan Hukum	Rp. 38.400.000
Jumlah		Rp. 48.402.026

D. PRIORITAS NASIONAL

Layanan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

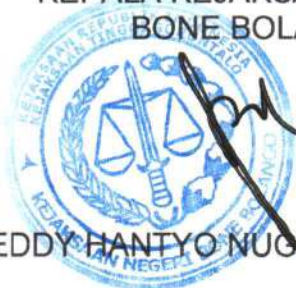
E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Bone Bolango, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BONE BOLANGO,



(FEDDY HANTYO NUGROHO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,



(SANTO MUSA, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HERIYADI DJUNAI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FEDDY HANTYO NUGROHO, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bone Bolango, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BONE BOLANGO,

(FEDDY HANTYO NUGROHO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA,

(HERIYADI DJUNAI, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Advocaat Generaal dan Jaksa Pengacara Negara	Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer	100%
2	Meningkatnya efektivitas pelayanan hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi	Indeks Persepsi atas pelayanan hukum	3,7

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	Jaksa Pengacara Negara		
3	Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata	Tingkat keberhasilan penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata	81%
		Tingkat keberhasilan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata	81%
4	Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara transparan, akuntabel, dan profesional	Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi	81%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi	81%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi	81%
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang hukum	Indeks kepuasan layanan Publik bidang hukum (Layanan hukum gratis, konsultasi hukum, bantuan hukum, pendampingan hukum, dan penyuluhan hukum)	3,7
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum	3,7
7	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan Negeri Bone Bolango	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pertimbangan Hukum / Penampungan Hukum / Bantuan Hukum	Rp. 600.000
2	Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa	Rp. 6.000.000
3	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 7.500.000
4	Pengelolaan HALO JPN	Rp. 1.500.000
5	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	Rp. 1.800.000
Jumlah		Rp. 17.400.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Bone Bolango, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BONE BOLANGO,



(FEDDY HANTYO NUGROHO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA,



(HERIYADI DJUNAIDI, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. GABRIEL ARYO GIARTO. W., S.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FEDDY HANTYO NUGROHO, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bone Bolango, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BONE BOLANGO,



(FEDDY HANTYO NUGROHO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET
DAN PENGELOLAAN BB,

(M. GABRIEL ARYO GIARTO. W., S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI
KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya pemulihan aset yang terintegrasi	Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset	91%
		Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana	91%
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana	91%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
2	Terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang transparan, akuntabel, dan modern	Tingkat efektivitas pengelolaan Rupbasan	4,1
		Tingkat efektivitas penyelesaian penyelamatan aset negara	4,1
		Tingkat efektivitas pengelolaan data aset negara berbasis teknologi	4,1

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pemeliharaan barang bukti/sitaan/rampasan	Rp. 41.090.000
2	Pemusnahan Barang bukti/sitaan/rampasan	Rp. 9.920.000
3	Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan	Rp. 28.690.000
4	Operasional Petugas Barang Bukti	Rp. 10.300.000
Jumlah		Rp. 90.000.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Bone Bolango, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BONE BOLANGO

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET
DAN PENGELOLAAN BB,

(FEDDY HANTYO NUGROHO, S.H., M.H.) (M. GABRIEL ARYO GIARTO. W., S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROHANDY MAKMUR, A.Md.
Jabatan : KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN, DATA STATISTIK
KRIMINAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN
PERPUSTAKAAN PADA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YAKUB DANIAL, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bone Bolango, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

(YAKUB DANIAL, S.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN,
DASKRIMTI, DAN PERPUSTAKAAN,

(ROHANDY MAKMUR, A.Md.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN, DATA STATISTIK KRIMINAL DAN
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PERPUSTAKAAN PADA SUBBAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur..

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI	Nilai SAKIP Kejaksaan Negeri Bone Bolango	73
2	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Kejaksaan RI	Nilai Kinerja Anggaran Kejaksaan Negeri Bone Bolango	90,25
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan RI	Tingkat kepatuhan satuan kerja terhadap standar operasional prosedur	85%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
4	Meningkatnya kualitas layanan internal dukungan manajemen dan kesehatan yustisial	Indeks kepuasan layanan dukungan internal manajemen Kejaksaan Negeri Bone Bolango	3,7
5	Meningkatnya kompetensi Aparatur Kejaksaan RI	Persentase aparatur yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai jabatan	65%
6	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri Bone Bolango	82%

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

Bone Bolango, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,



(YAKUB DANIAL, S.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN,
DASKRIMTI, DAN PERPUSTAKAAN,



(ROHANDY MAKMUR, A.Md.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DWI BAMBANG CAHYONO, A.Md.
Jabatan : KEPALA URUSAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YAKUB DANIAL, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bone Bolango, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

(YAKUB DANIAL, S.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA URUSAN TATA USAHA,
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DAN PNB, P

(DWI BAMBANG CAHYONO, A.Md.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA URUSAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SUBBAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur..

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI	Nilai SAKIP Kejaksaan Negeri Bone Bolango	73
2	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Kejaksaan RI	Nilai Kinerja Anggaran Kejaksaan Negeri Bone Bolango	90,25
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan RI	Tingkat kepatuhan satuan kerja terhadap standar operasional prosedur	85%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
4	Meningkatnya kualitas layanan internal dukungan manajemen dan kesehatan yustisial	Indeks kepuasan layanan dukungan internal manajemen Kejaksaan Negeri Bone Bolango	3,7
5	Meningkatnya kompetensi Aparatur Kejaksaan RI	Persentase aparatur yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai jabatan	65%
6	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri Bone Bolango	82%

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

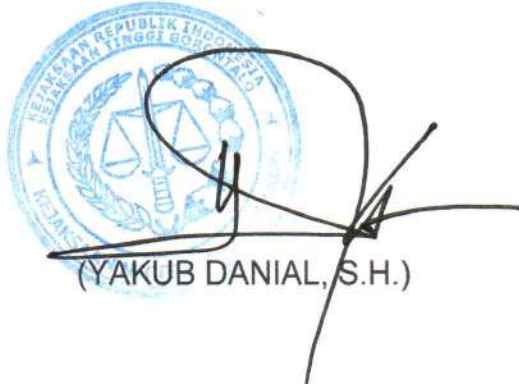
Bone Bolango, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

KEPALA URUSAN TATA USAHA,
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DAN PNBP,



(YAKUB DANIAL, S.H.)



(DWI BAMBANG CAHYONO, A.Md.)